BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Danau merupakan salah satu ekosistem penting yang memiliki fungsi ekologis dan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Selain sebagai sumber air, danau juga mendukung aktivitas perikanan, pertanian, pariwisata, dan menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna. Namun, dalam beberapa 1ltern terakhir, banyak danau di Indonesia menghadapi berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran, sedimentasi, serta penyempitan area akibat perubahan penggunaan lahan di daerah aliran sungai (DAS). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah pusat dan daerah telah merumuskan berbagai kebijakan pengelolaan danau. Kebijakan ini mencakup pelestarian lingkungan, pengendalian pencemaran, serta pembangunan infrastruktur seperti proyek pengerukan, pembuatan waduk pengendali banjir, dan perbaikan irigasi. Pembangunan infrastruktur diharapkan mampu memulihkan fungsi danau, mengatasi dampak yang terjadi, serta mendukung pemanfaatan danau secara berkelanjutan. (Ibrahim, S., & Taufik, M. 2020)

Salah satu contoh nyata dari permasalahan ini dapat dilihat pada Danau Limboto, yang terletak di Provinsi Gorontalo. Menurut Kementrian Lingkungan Hidup, danau Limboto termasuk kategori danau kritis. Hal tersebut dikarenakan penyusutan yang terus terjadi di danau Limboto yang mengancam keberlanjutan dari danau tersebut Berdasarkan data yang diperoleh dari BALIHRISTI bahwa pada tahun 1932 rata-rata kedalaman Danau Limboto 30 meter dengan luas 7.000 Ha, dan tahun 1961 rata-rata kedalaman Danau berkurang menjadi 10 meter dan luas menjadi 4.250 Ha. Sedangkan tahun 1990 – 2018 kedalaman Danau Limboto rata-rata tinggal 2,5 meter dengan luas 3.000 Ha Bolango, Pohu, Ritenga dan sungai Topodu. (Ibrahim, S., & Taufik, M. 2020)

Danau Limboto menjadi salah satu 1lter sumber daya alam yang dimiliki Provinsi Gorontalo saat ini. Areal danau ini berada pada dua wilayah yaitu ± 30 % wilayah kota Gorontalo dan ± 70 % di wilayah Kabupaten Gorontalo dan menjangkau 5 kecamatan. Air yang masuk ke danau Limboto bersumber dari air hujan yang langsung jatuh ke danau dan air yang berasal dari sungai-sungai yang masuk ke danau. Sungai-sungai yang mengalir dan bermuara ke Danau Limboto terdapat sebanyak 23 sungai diantaranya Aloe, Marisa, Meluopo, Biyonga, Bulota, dan Talubongo. Danau Limboto merupakan bagian penting dari ekosistem perairan yang berfungsi sebagai tempat hidup dan pengatur fungsi hidrologi. Saat ini, fungsi danau

Limboto sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya masalah penyusutan luas dan pendangkalan danau. .(Ibrahim, S., & Taufik, M. 2020)

Perencanaan dan implementasi pembangunan infrastruktur di sekitar daerah aliran sungai Danau Limboto, seperti jalan raya, jembatan, dan pemukiman, telah mempercepat laju sedimentasi yang signifikan. Menurut data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, laju sedimentasi di Danau Limboto meningkat hingga 30% dalam lima tahun terakhir, terutama disebabkan oleh aktivitas pembangunan yang kurang memperhatikan tata kelola air. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Negeri Gorontalo pada tahun yang sama, aktivitas ini tidak hanya menyebabkan erosi lahan, tetapi juga mengalirkan sedimen ke danau, yang memperparah pendangkalan Misalnya, pembukaan lahan untuk pertanian dan pemukiman baru sering kali tidak dilengkapi dengan 2ltern pengendalian erosi yang memadai (Hidayat, M., & Saputra, D. (2021)

Kebijakan pembangunan yang kurang berkelanjutan di sekitar Danau Limboto telah memperburuk degradasi ekosistem dan mengurangi fungsi ekologisnya, seperti yang terlihat dalam berbagai laporan dan data terbaru. Menurut laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), luas Danau Limboto telah mengalami penyusutan dari 7.000 hektar pada tahun 1932 menjadi hanya sekitar 2.500 hektar di tahun-tahun terakhir. Salah satu penyebab utama adalah sedimentasi yang tinggi, yang dipicu oleh alih fungsi lahan di sekitarnya. Lahan yang sebelumnya berfungsi sebagai kawasan resapan air berubah menjadi area pertanian, permukiman, dan infrastruktur.(Mulyadi, A., & Suharto, B 2021)

Surah Al-Baqarah (2:205)

وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Artinya :Dan apabila ia berpaling (dari engkau), dia berjalan di bumi untuk membuat kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, padahal Allah tidak menyukai kerusakan

Ayat ini menghubungkan dengan pentingnya tanggung jawab moral dalam melaksanakan proyek pembangunan, agar tidak hanya berfokus pada keuntungan material atau ekonomi, tetapi juga memperhatikan kelestarian alam dan keseimbangan lingkungan. Infrastrukturnya bisa menjadi sarana kebaikan dan kemajuan, tetapi jika dilakukan tanpa memperhatikan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan, akan menimbulkan kerusakan ekosistem seperti yang disebutkan dalam ayat tersebut.Dalam implementasi pembangunan di sekitar Danau misalnya, perlu dilakukan evaluasi kebijakan yang mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap

lingkungan dan komunitas lokal. Ayat ini memberikan peringatan spiritual agar pembangunan tidak mengakibatkan kehancuran tanah, tanaman, atau makhluk hidup yang bergantung pada ekosistem tersebut, karena Allah tidak menyukai kerusakan.

Beberapa tantangan utama dalam evaluasi kebijakan pengelolaan pembangunan infrastruktur di Danau Limboto, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023 dan laporan Universitas Negeri Gorontalo, meliputi keterbatasan data dan informasi. Banyak kebijakan yang disusun berdasarkan data yang kurang lengkap dan tidak mutakhir, seperti ketidakakuratan data sedimentasi yang diperkirakan mencapai 1,5 juta meter kubik per tahun, tetapi tidak selalu diperbaharui secara rinci. Kendala anggaran juga menjadi masalah signifikan, di mana alokasi dana untuk rehabilitasi lingkungan menurut laporan Bappenas hanya mencakup sekitar 35-40% dari total kebutuhan yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Selain itu, ketidaksesuaian kebijakan yang bersifat *top-down* sering kali tidak memenuhi kebutuhan, sebagaimana tercatat dalam studi dari Universitas Negeri Gorontalo, di mana banyak kebijakan tidak mempertimbangkan kondisi 3ltern, ekonomi, dan budaya masyarakat sekitar danau. Kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan regulasi lingkungan oleh otoritas terkait juga menyebabkan maraknya pelanggaran, seperti pembukaan lahan dan pembuangan limbah 3lternat tanpa sanksi tegas, yang menghambat upaya rehabilitasi dan pelestarian Danau Limboto(Purnomo, E., & Fitriani, S 2022)

Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Gorontalo tahun 2021, sejumlah program telah diimplementasikan, seperti penanaman tanaman penutup lahan di area sekitar danau, pembangunan infrastruktur untuk pengendalian banjir, serta pengerukan sedimen yang menumpuk. Meskipun demikian, upaya-upaya tersebut belum mampu memberikan solusi yang komprehensif terhadap berbagai masalah yang dihadapi Danau Limboto, seperti laju sedimentasi yang masih tinggi, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas air. Faktor-faktor ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih terintegrasi, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, serta perencanaan dan pengawasan yang lebih intensif guna memastikan kelestarian danau secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antarinstansi sering kali menjadi hambatan dalam implementasi program-program penyelamatan Danau Limboto. Beberapa pihak menyoroti pentingnya kerja sama yang lebih erat antara pemerintah daerah, pusat, dan masyarakat dalam menjaga keberlanjutan danau ini. Tantangan lain yang dihadapi adalah alih fungsi lahan di sekitar kawasan danau yang menyebabkan semakin berkurangnya daerah resapan air, memperparah laju sedimentasi dan menurunkan kapasitas danau.(Putra, A., & Dewi, K. 2023)

Menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo tahun 2021, salah satu tantangan utama dalam pengelolaan Danau Limboto adalah kurangnya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi yang efektif antar lembaga terkait. Misalnya, pembangunan zonasi sempadan belum sepenuhnya sesuai dengan Pasal 7 yang mengatur pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur. Meskipun telah ada Peraturan Daerah (Perda) Gorontalo No. 1 Tahun 2008 yang secara formal mengatur pengelolaan danau limboto. Hal ini disebabkan oleh perbedaan komitmen antara instansi yang terlibat, serta pembagian kewenangan yang belum jelas. Situasi ini seringkali mengakibatkan tumpang tindih program atau bahkan program yang saling bertentangan, yang pada akhirnya menghambat upaya penyelamatan danau secara penyelamatan danau secara menyeluruh. Lebih lanjut, pengawasan yang tidak konsisten dan minimnya evaluasi terhadap hasil implementasi program-program yang sudah berjalan semakin memperburuk efektivitas kebijakan. Kelemahan dalam komunikasi antar-lembaga juga memperlambat langkah-langkah konservasi yang sebenarnya bisa lebih efektif jika koordinasi berjalan dengan baik. Ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih terstruktur, dengan pendekatan lintas yang lebih kuat serta dukungan regulasi dan kelembagaan yang lebih jelas dan efektif (Samsul, R., & Amalia, D. (2018).

Berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh peneliti terkait evaluasi kebijakan pengelolaan pembangunan infrastruktur di Danau Limboto menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara rencana kebijakan dan implementasi di lapangan. Salah satu temuan utama adalah dampak 4lternat terhadap ekosistem dan kualitas air akibat sedimentasi dan pencemaran yang semakin parah, yang diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur di sekitar danau. Hal ini di karenakan masyarakat tidak dilibatkan dalam proses kegiatan yg akan mempengaruhi pembangunan infrastruktur dimaksud contoh pembuatan zonasi sempadan dan lain lain. Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi lintas 4ltern dan pelibatan masyarakat untuk menciptakan kebijakan yang lebih 4lternat dan berkelanjutan dalam mengelola Danau Limboto.

Memperhatikan fenomena evaluasi kebijakan pengelolaan pembangunan infrastruktur Danau Limboto, peneliti merasa penting untuk meneliti lebih lanjut aspek-aspek yang menjadi penghambat efektivitas kebijakan tersebut. Penelitian lanjutan dapat difokuskan pada analisis mendalam mengenai peran koordinasi antar-lembaga, kejelasan pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, peneliti juga tertarik untuk menggali lebih jauh bagaimana keterbatasan anggaran dan dukungan politik memengaruhi pelaksanaan program pembangunan infrastruktur yang

berkelanjutan. Adapun judul penelitian ini adalah “Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Danau Limboto Studi Kasus Pembangunan Infrastruktur”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat peneliti ambil identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Kurangnya Evaluasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga terkait, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan sempadan dan aturan pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur, meskipun sudah ada regulasi formal dalam Perda Gorontalo No. 1 Tahun 2008.
2. Minimnya keterlibatan partisipasi masyarakat 5lter disekitar dalam Limboto, hal ini dikarenakan tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan atau pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur

1.3 Rumusan Masalah

1. Bagaiamana Evaluasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga terkait, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan sempadan dan aturan pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur, meskipun sudah ada regulasi formal dalam Perda Gorontalo No. 1 Tahun 2008.?
2. Bagaimana keterlibatan partisipasi masyarakat 5lter disekitar danauLimboto, dikarenakan tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan atau pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi Kurangnya sinkronisasi kebijakan dan koordinasi antar lembaga terkait, sehingga terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan pembangunan sempadan dan aturan pemanfaatan untuk pembangunan infrastruktur, meskipun sudah ada regulasi formal dalam Perda Gorontalo No. 1 Tahun 2008.
2. Untuk mengidentifikasi keterlibatan partisipasi masyarakat disekitar danauLimboto, dikarenakan tidak dilibatkannya masyarakat dalam perencanaan atau pengambilan keputusan dalam pembangunan infrastruktur.

1.5. Manfaat Penelitian

1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan dan dapat digunakan untuk menambah wawasan bagi peneliti dan pembaca tentang Evaluasi kebijakan pengelolaan pembangunan infrastruktur di Danau Limboto termasuk pengembangan teori kebijakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, serta mendukung pendekatan 6lternat dalam pembangunan yang mempertimbangkan dampak 6ltern dan ekologi.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Bagi Masyarakat

   Khususnya dikalangan masyarakat remaja diharapkan penelitian ini untuk menambah wawasan bagi para masyarakat untuk akan lebih terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan terkait pembangunan dan pengelolaan lingkungan di sekitar mereka.

2. Bagi Institusi Pendidikan

   Bagi mahasiswa penelitian ini dapat menjadi bahan ajar dan referensi bagi institusi pendidikan dalam pengembangan kurikulum yang lebih relevan, terutama dalam bidang lingkungan, kebijakan 6ltern, dan pembangunan berkelanjutan

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian lebih lanjut, diharapkan penelitian ini menjadi referensi awal bagi peneliti selanjutnya dalam mengevaluasi kebijakan lebih lanjut.